



ANALISIS SEKTOR BASIS PEREKONOMIAN DAERAH: STUDI KASUS BULUKUMBA

Analysis of Basic Economic Sector in Regent Area: A Case Study of Bulukumba

Tenry Syawal^{1*}, Nursini², Hamrullah³, Suryadi Lambali⁴

^{1*} Program Sarjana Departemen Ilmu
Ekonomi. Fakultas Ilmu Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Hasanuddin.
Email: tenry.syawal@gmail.com

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Hasanuddin.

³Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Hasanuddin.

⁴Departemen Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin.

Keywords: Base Sector, Location
Quotient Analysis, Economic Growth

Kata kunci: Sektor Basis, Analisis
Location Quotient, Pertumbuhan
Ekonomi

Abstract

This study aims to determine the base sector in the economy of Bulukumba Regency in the 2015-2019 period and to determine the basis sector that is consistent in encouraging the acceleration of economic growth in Bulukumba Regency. The data used in this study is secondary data based on the 2015-2019 time series, sourced from the Bulukumba Regency BPS report, South Sulawesi BPS report, various official websites of the Bulukumba Regency government and the South Sulawesi Provincial Government. The data analysis method used is Location Quotient (LQ) analysis. The results of this study indicate that the location quotient analysis of the base sector of Bulukumba Regency in the 2015-2019 period can meet regional consumption needs and from the Klassen Typology analysis the base sector consistently encourages economic growth in Bulukumba Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Bulukumba pada periode 2015-2019 dan untuk mengetahui sektor basis yang konsisten dalam mendorong percepatatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu periode 2015-2019, yang bersumber dari laporan BPS Kabupaten Bulukumba, laporan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai situs resmi pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis Location Quotient (LQ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis location quotient sektor basis Kabupaten Bulukumba pada periode tahun 2015-2019 dapat

memenuhi kebutuhan konsumsi daerah dan dari analisis Tipologi Klassen sektor basis konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, era globalisasi mendorong aktivitas ekonomi maju berkembang tanpa batas baik dalam skala daerah, nasional bahkan internasional. Negara Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dalam pengembangan daerah tentunya dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal (Arsyad, 2011). Menurut Glasson (1990) kemakmuran suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan (Mangun, 2007).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tarigan (2005) memberikan penjelasan bahwa dengan kondisi yang demikian, maka masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor atau komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah potensi sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta bantuan partisipasi masyarakatnya menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi daerah yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Kondisi perekonomian suatu wilayah atau daerah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengelola segala potensi yang dimiliki, serta bijaksana dalam memberikan kebijakan, langkah dan upaya dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Upaya menciptakan kemandirian perekonomian daerah, pengelolaan sumber daya potensial menjadi faktor yang sangat penting, karena akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, disamping dana yang berasal dari pemerintah pusat. Pengelolaan sektor-sektor perekonomian ini untuk menjadi sektor unggulan atau bisa diandalkan akan disesuaikan dengan kapasitas daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki serta sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan agar terhindar dari kesenjangan ekonomi.

Pengertian sektor basis atau unggulan pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan basis atau unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan yang dimiliki negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor basis apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis atau unggulan, maka sektor tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain. Sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis, maka sektor tersebut harus mengimpor produk barang atau jasa dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi selatan memiliki luas wilayah 1.154,58 KM² dengan jumlah penduduk sebanyak 420.603 jiwa berdasarkan data dari BPS tahun 2020 yang terbagi kedalam 10 Kecamatan, yang masing-masing wilayah bagian tersebut memiliki karakteristik potensi sumber daya alam yang beragam dan bisa berpeluang menjadi sektor yang dapat diunggulkan sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Pentingnya mengidentifikasi sektor basis ini untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Bulukumba karena sektor basis mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan disamping tujuan produksinya untuk memenuhi kebutuhan daerah serta dapat melakukan ekspor keluar daerah. Maka hubungan langsung yang didapatkan oleh pemerintah dalam ekspor ini dapat menarik investor untuk masuk ke daerah menanamkan modalnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat memberikan solusi dan

kebijakan yang dapat menciptakan multiplier efek yang tinggi dengan pengelolaan yang baik pada pembentukan sektor-sektor PDRB.

Menurut data PDRB yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bulukumba, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015-2019 fluktuatif dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,62%, 6,77%, 6,89%, 5,05%, 5,49%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi paling besar meningkat terjadi pada tahun 2017 sebesar 6,89%. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,05% walaupun dalam nilai riil PDRB Kabupaten Bulukumba nilainya terus meningkat hal ini bisa terjadi dikarenakan sektor-sektor lain yang pertumbuhannya meningkat dan saling menutupi antar satu sama lain. Melihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba yang fluktuatif. Untuk melihat lebih rinci angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB (<i>miliar rupiah</i>)	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2015	6.774,32	5,62%
2016	7.232,84	6,77%
2017	7.730,91	6,89%
2018	8.121,33	5,05%
2019	8.567,46	5,49%

Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 14,21 triliun rupiah dengan kontribusi dari kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 37,13%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bulukumba memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% di tahun 2019 dimana angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,05% pada tahun 2018. Dengan dukungan dari sektor pertanian yang cukup besar itu telah menyebabkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung seperti perdagangan dan pengangkutan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulukumba.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang strukturnya disusun oleh 17 sektor ekonomi. Sektor-sektor perekonomian tersebut merupakan cerminan dari PDRB yang menjadi indikator untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi. Jikalau Pemerintah daerah dapat mengelola sektor-sektor ekonominya menjadi sektor basis yang dapat mengeksport hasil produknya hingga ke daerah lain maka pembentukan PDRB dapat meningkat seiring dengan meningkatnya hasil produk dari sektor basis tersebut sehingga kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pembangunan daerah dapat terpenuhi secara maksimal. Kabupaten Bulukumba sendiri memiliki sektor-sektor ekonomi penopang daerah yang antar sektor satu dengan sektor yang lain memiliki

potensi untuk menjadi sektor utama daerah. Adapun 17 sektor tersebut Selengkapnya disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bulukumba (miliar rupiah) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	4.108,04	4.436,09	4.917,88	5.108,85	5.277,24
Pertambangan	228,97	281,75	322,70	372,53	384,75
Industri	660,96	738,05	804,30	858,20	973,45
Listrik dan Gas	11,45	13,16	13,62	14,92	15,94
Air, Sampah dan Daur Ulang	3,22	3,42	3,80	4,11	4,33
Konstruksi	842,47	990,89	1.141,23	1.343,77	1.447,69
Perdagangan	1.396,36	1.678,84	1.888,00	2.165,28	2.443,28
Transportasi	219,67	253,84	276,56	307,38	339,97
Akomodasi	55,25	67,84	82,77	98,28	108,36
Informasi dan Komunikasi	272,88	306,30	363,92	407,89	459,68
Jasa Keuangan	309,48	366,38	402,47	442,49	501,22
Real Estate	380,11	456,58	535,40	549,23	618,54
Jasa Perusahaan	2,77	3,15	3,78	4,31	4,84
Administrasi Pemerintahan	648,17	667,55	717,02	802,42	907,92
Jasa Pendidikan	264,72	312,48	366,81	411,82	427,43
Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial	104,23	122,96	143,96	163,52	185,69
Jasa Lainnya	59,68	70,64	84,53	98,91	114,26
PDRB	9.568,40	10.769,94	12.068,74	13.198,92	14.214,59

Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka (2020)

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2015-2019 terjadi perkembangan, dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Secara umum setiap sektoral mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB dari tahun-ketahun. Pada tahun 2019 merupakan pencapaian yang paling tinggi selama lima tahun terakhir, hal ini tidak lepas dari peran sektor-sektor ekonomi sebagai penyumbang atas terbentuknya PDRB suatu wilayah. Semakin besar sumbangan atau peran suatu sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian suatu daerah.

Peningkatan nilai PDRB ini tidak terlepas dari kontribusi ke-17 sektor lapangan usaha. Sektor-sektor ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah jika dikelola dengan baik dan maksimal maka sektor tersebut akan memberikan kontribusi yang baik bagi daerah khususnya Kabupaten Bulukumba.

Selama lima tahun terakhir sektor pertanian memiliki kontribusi cukup besar jika dibandingkan dengan sektor lain. Sampai tahun 2019, sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba. Sebesar 37,13% perekonomian Kabupaten Bulukumba di dominasi oleh sektor pertanian, selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 17,19% dan kemudian sektor konstruksi sebesar 10,18%. Adapun kontribusi sektor lainnya yang berada di bawah 10 persen. Untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Bulukumba secara lebih rinci dilihat dari sektor-sektor yang terdapat di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel persentase kontribusi sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba ADHB Tahun 2015-2019 (%)

Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	42,93	41,19	40,75	38,71	37,13
Pertambangan	2,39	2,62	2,67	2,82	2,71
Indutstri	6,91	6,85	6,66	6,50	6,85
Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
Air, Sampah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	8,80	9,20	9,46	10,18	10,18
Perdagangan	14,59	15,59	15,64	16,40	17,19
Transportasi	2,30	2,36	2,29	2,33	2,39
Akomodasi	0,58	0,63	0,69	0,74	0,76
Informasi dan Komunikasi	2,85	2,84	3,02	3,09	3,23

Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Jasa Keuangan	3,23	3,40	3,33	3,35	3,53
Real Estate	3,97	4,24	4,44	4,50	4,30
Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Administrasi Pemerintahan	6,77	6,20	5,94	6,08	6,93
Jasa Pendidikan	2,77	2,90	3,04	3,12	3,01
Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial	1,09	1,14	1,19	1,24	1,31
Jasa Lainnya	0,62	0,66	0,70	0,75	0,80
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2020

Meskipun sektor pertanian masih sangat dominan, tetapi kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan perlahan-lahan ditahun 2019 hingga mencapai angka 37,13% dari 42,93% ditahun 2015. Sebaliknya sektor lain seperti sektor perdagangan dan kosntruksi menunjukkan peningkatan kontribusi secara perlahan-lahan pula. Perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami transformasi dari ketergantungan terhadap sektor pertanian kepada sektor-sektor lainnya.

Melihat perkembangan masing-masing sektor ekonomi dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulukumba yang mengalami pasang surut, diperlukan pengkajian terhadap pertumbuhan dan kontribusi terhadap sektor-sektor ekonomi serta pengkajian terhadap sektor ekonomi basis dan nonbasis yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Dengan mengetahui dan memahami kinerja sektor basis dan nonbasis dalam pembangunan maka pemerintah dapat memutuskan serangkaian kebijakan pembangunan, khususnya yang terkait dengan ketersediaan kesempatan kerja yang luas di sektor ekonomi basis dan dengan berlakunya otonomi daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif, menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya bagi kesejahteraan masyarakatnya khususnya Kabupaten Bulukumba.

Kajian Literatur

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan sturuktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja (Ahmad Mahyudi, 2004).

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan Rill per-kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditujukan tiga nilai pokok yaitu: Pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs). Kedua, meningkatnya rasa harga diri (self-estem) masyarakat sebagai manusia. Ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom form servitude) (Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2005).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses,yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2005).

Pembangunan daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, indentifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru (Subandi, 2014).

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. pertumbuhan ekonomi wilayah adalah perubahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut,

yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Jadi pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang berpotensi pada daerah tersebut (Taringan, 2005).

Sektor Basis dan Non Basis

Sektor basis adalah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor nonbasis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries (Sjafrizal, 1985).

Ricardo dalam Taringan (2005), sewaktu membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relative dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil.

Pada saat ini istilah yang sering dipakai adalah competitive advantage (keunggulan kompetitif). Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah/luar negeri/pasar global. Istilah keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti, yaitu cukup melihat apakah produk yang dihasilkan bisa dijual di pasar global secara global secara menguntungkan. Hal ini tidak lagi membandingkan potensi komoditi yang sama di suatu negara dengan negara lainnya, melainkan membandingkan potensi komoditi suatu negara terhadap komoditi semua negara pesaingnya di pasar global.

Terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: Sumber daya alam, teknologi, akses wilayah, pasar, sentra produksi, tenaga kerja, sifat masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non-basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasarannya adalah bersifat lokal.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (primer mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap

perubahan yang terjadi pada sektor basis dan nonbasis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (location quotient). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (leading sectors) dan non unggulan.

Analisis Location Quotient dapat menggunakan variabel tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDRB) di suatu wilayah (Kabupaten) dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama diprovinsi dimana kabupaten tersebut dalam lingkupnya (Adisasmita, 2005)

Arsyad (2005) berpendapat, ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu, entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan cara pengembangan suatu usaha sendiri (BUMD). Perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi. Perannya sebagai Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Perannya sebagai Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk-produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran. (Arsyad, 2009)

Menurut Adisasmita (2005), aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (primer mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian regional.

Menurut Arsyad (2005), teori basis ekonomi ini merupakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation).

Teori basis ekonomi ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu wilayah harus meningkatkan arus atau aliran langsung dari luar wilayah agar bisa tumbuh secara efektif, yaitu dengan cara meningkatkan ekspor. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Tiebout, dalam bukunya Nugroho dan Dahuri (2004) Tiebout mengemukakan

bahwa pasar ekspor merupakan penggerak utama atau sebagai mesin pertumbuhan ekonomi wilayah. Hasil ekspor mendatangkan pendapatan dan pendapatan tambahan melalui pengaruh pengganda (multiplier). Dengan demikian, kegiatan ekspor mengakibatkan pemasukan uang ke dalam wilayah dan dorongan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah.

Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan pada data PDRB, baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. Dimana PDRB harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu daerah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi). Perhitungan metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

Pendekatan produksi (Production Approach) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui nilai tambah (added value). Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor atau sub sektor tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara (Tarigan, 2007).

Pada pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Yang terdiri dari sembilan sektor yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan/konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Pendekatan pendapatan (Income Approach) dilakukan dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB

melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi.

Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil perhitungan yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Pergeseran Sektor Ekonomi

Menurut Todaro (2003), teori-teori perubahan struktural memusatkan perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang lebih modern serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh Lewis yang terkenal dengan model teoritisnya "surplus tenaga kerja dua sektor" dan Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang "pola-pola pembangunan" (patterns of development).

Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi perubahan struktur perekonomian dimana semula mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi pertanian menurun. Faktor penyebab terjadinya perubahan struktur perekonomian antara lain ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah.

Pengembangan Sektor Unggulan Untuk Strategi Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (2005), permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Menurut Emma (2014), sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan wilayah. Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan dengan parameter-parameter seperti:

1. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi.
2. Sektor yang mempunyai multiplier effect yang tinggi.
3. Sektor yang kandungan depositnya melimpah.
4. Memiliki potensi added value yang cukup baik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Menurut Rachbini dalam jurnal Lantemona (2014), ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Studi Terdahulu

Hasriadi (2014) meneliti sektor ekonomi unggulan Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan metode yang digunakan adalah analisis Location Quotient dan analisis Shift Share. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis Location Quotient menunjukkan bahwa sektor basis ($LQ > 1$) di Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan pendekatan PDRB yaitu sektor pertanian. Analisis shift share menunjukkan bahwa sektor ekonomi unggulan berdasarkan PDRB adalah sektor pertambangan, sektor industri, gas dan air bersih, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Studi lain oleh Lestari (2017) meneliti tentang peranan sektor basis terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan metode yang digunakan adalah analisis Location Quotient. Hasil penelitian perhitungan LQ terhadap 9 (sembilan) sektor perekonomian di Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan indikator PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2001-2012, terdapat 3 (tiga) sektor yaitu sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, sektor penggalian dan pertambangan serta sektor perdagangan dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,63, 1,01 dan 1,37. Dengan nilai $LQ > 1$ (satu) yang memiliki arti bahwa sektor

tersebut adalah sektor basis atau dapat memberikan peranan untuk ekspor daerah dan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sektor-sektor yang cukup beragam dan potensial untuk dikembangkan. Kabupaten Bulukumba menjadi lokasi penelitian karena daerah memiliki potensi di berbagai sektor unggulan yang dapat dikembangkan guna mengangkat perekonomian daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu periode 2015-2019, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan mendapatkan literatur dan hal-hal lain yang relevan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series/rentang waktu data PDRB Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi-Selatan selama tahun 2015-2019. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan BPS Kabupaten Bulukumba, laporan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai situs resmi pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu periode 2015-2019, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan mendapatkan literatur dan hal-hal lain yang relevan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series/rentang waktu data PDRB Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi-Selatan selama tahun 2015-2019.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan BPS Kabupaten Bulukumba, laporan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai situs resmi pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data yaitu Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen. Metode pertama, Location Quotient adalah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisa sektor potensial atau sektor basis dalam suatu daerah, dengan cara mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi dalam suatu daerah yaitu membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah Kabupaten Bulukumba dengan sektor sejenis dalam perekonomian Provinsi Sulawesi - Selatan.

Rumus untuk menghitung LQ (Glasson, 1997) adalah:

$$LQ = \frac{y_i^*/y_t^*}{Y_i/Y_t}$$

Dimana:

LQ = Koefisien LQ

y_i^* = Pendapatan (PDRB) sektor tertentu di Kabupaten Bulukumba

y_t^* = Pendapatan (PDRB) total daerah di Kabupaten Bulukumba

Y_i = Pendapatan (PDRB) sektor tertentu di Provinsi Sulsel

Y_t = Pendapatan (PDRB) total di Provinsi Sulsel

Adapun klarifikasi LQ sebagai berikut :

- $LQ > 1$ Merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut disuatu kabupaten lebih besar dibandingkan sektor sejenis di tingkat provinsi.
- $LQ = 1$ Berarti kemampuan produksi sektor tersebut di suatu kabupaten sama dengan sektor sejenis di tingkat provinsi.
- $LQ < 1$ Merupakan sektor non basis dan kemampuan sektor tersebut lebih kecil dibanding dengan sektor sejenis di tingkat provinsi.

Apabila $LQ > 1$, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bulukumba. Sebaliknya apabila nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bulukumba.

Metode analisis kedua, Tipologi Klassen adalah salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian suatu wilayah (Sjafrisal 2008). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sektoral. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan mengklasifikasikan sektoral berdasarkan analisis ini dapat dilihat sektoral yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Klasifikasi tipologi kelas dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral

Rata-Rata Laju Pertumbuhan Sektoral (r)	Rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB (Y)	
	Y sektor \geq Y PDRB	Y sektor $<$ Y PDRB
r sektor \geq r PDRB	Sektor tumbuh maju dan pesat (1)	Sektor maju tapi tertekan (2)
r sektor $<$ r PDRB	Sektor potensial / dapat berkembang pesat (3)	Sektor relatif tertinggal (4)

Perhitungan Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan melakukan perbandingan:

1. Tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Bulukumba dengan tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang sama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Tingkat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulukumba dengan tingkat kontribusi sektor-sektor ekonomi yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dan Hasil Data: Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient digunakan untuk melihat kondisi perekonomian pada periode waktu tertentu. Dengan analisis berikut dapat ditemukan sektor basis dan nonbasis dengan membandingkan sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha pada suatu daerah regional dengan daerah yang lebih luas. Dalam penelitian ini untuk mengetahui sektor basis dan nonbasis Kabupaten Bulukumba dan wilayah pembanding Provinsi Sulawesi Selatan dalam skala regional yang lebih luas, dengan periode tahun 2015-2019.

Nilai LQ bisa dikatakan sebagai pedoman untuk dijadikan dasar untuk menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi kebutuhan di daerah lain atau surplus. Hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Bulukumba dari kurun waktu 2015-2019 yang dicantumkan pada tabel 4.4. Dari hasil perhitungan indeks *Location Quotient* PDRB Kabupaten Bulukumba selama periode penelitian tahun 2015-2019, maka dapat diketahui sektor-sektor basis dan non basis. Nilai LQ $>$ 1 berarti bahwa peranan suatu sektor di kabupaten lebih dominan dibandingkan sektor ditingkat provinsi dan sebagai petunjuk bahwa kabupaten surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya apabila nilai LQ $<$ 1 berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di kabupaten dibandingkan peranannya di tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ pada tabel 5 terdapat lima sektor basis, yaitu: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reprasi Mobil dan Sepeda Motor, Real Estate dan Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan nilai rata-rata LQ tertinggi sebesar 1,93 selama lima tahun. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Bulukumba mampu memenuhi kebutuhan domestik dan mampu mengekspor ke luar daerah. Berdasarkan lapangan usaha, mayoritas penduduk Kabupaten Bulukumba bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Hal ini berbanding lurus dengan keadaan alam Kabupaten Bulukumba yang merupakan sektor basis pertanian, dengan subsektor tanaman pangan.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Indeks LQ Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

Sektor Ekonomi	Tahun					Σ	Rata - rata	Ket.
	2015	2016	2017	2018	2019			
Pertanian	2,00	1,94	1,94	1,88	1,90	9,66	1,93	Basis
Pertambangan	0,28	0,32	0,35	0,40	0,41	1,76	0,35	Non-Basis
Industri	0,49	0,47	0,47	0,50	0,51	2,45	0,49	Non-Basis
Listrik dan Gas	1,84	1,88	1,88	1,91	1,95	9,46	1,89	Basis
Air, Sampah dan Daur Ulang	0,35	0,34	0,33	0,34	0,35	1,71	0,34	Non-Basis
Konstruksi	0,70	0,71	0,72	0,74	0,71	3,58	0,72	Non-Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reprasi Mobil dan Sepeda Motor.	1,05	1,07	1,06	1,06	1,08	5,32	1,06	Basis
Transportasi	0,58	0,58	0,58	0,59	0,64	2,97	0,59	Non-Basis
Akomodasi	0,41	0,43	0,44	0,46	0,46	2,2	0,44	Non-Basis
Informasi	0,57	0,58	0,58	0,57	0,56	2,86	0,57	Non-Basis
Jasa Keuangan	0,96	0,97	0,96	0,98	1,05	4,92	0,98	Non-Basis
Real Estate	1,13	1,22	1,32	1,37	1,35	6,39	1,28	Basis
Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,22	0,04	Non-Basis
Administrasi	1,47	1,47	1,47	1,50	1,50	7,39	1,48	Basis

Sektor Ekonomi	Tahun					Σ	Rata - rata	Ket.
	2015	2016	2017	2018	2019			
Jasa pendidikan	0,54	0,55	0,55	0,56	0,55	2,75	0,55	Non-Basis
Jasa kesehatan	0,54	0,54	0,55	0,56	0,56	2,75	0,55	Non-Basis
Jasa lainnya	0,56	0,56	0,56	0,57	0,59	2,84	0,57	Non-Basis

Sumber : Hasil Analisis Data PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

Meningkatnya jumlah aktivitas basis ekonomi di suatu daerah akan menciptakan laju pendapatan ke daerah tersebut. Dengan meningkatnya laju pendapatan tersebut akan meningkat pula permintaan akan barang-barang dan pelayanan di daerah tersebut yang dihasilkan oleh sektor non basis. Tetapi, apabila menurunnya aktivitas sektor basis di suatu daerah akan mengakibatkan menurunnya pendapatan yang masuk ke daerah dan akan mengurangi permintaan terhadap sektor non basis. Oleh karena itu kegiatan sektor basis berperan penting sebagai penggerak utama terhadap situasi dan kondisi perekonomian daerah.

Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita yang dilihat dari data PDRB pada sumbu horisontal. Dalam hal Untuk mengetahui sektor-sektor yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten bulukumba pada periode 2015- 2019 di gunakan perhitungan Tipologi Klassen yang dapat dilihat secara rinci pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

Sektor Ekonomi	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata -rata Kontribusi	Kuadran
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,030	40,84	2
Pertambangan dan Penggalian	0,110	2,02	4
Industri Pengolahan	0,060	6,78	3
Pengadaan Listrik dan Gas	0,082	0,18	1
Pengadaan Air, Sampah dan Daur Ulang	0,042	0,04	4
Konstruksi	0,077	8,69	4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reprasi Mobil dan Sepeda Motor.	0,099	15,67	2

Sektor Ekonomi	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata -rata Kontribusi	Kuadran
Transportasi	0,086	2,18	3
Akomodasi	0,120	0,63	4
Informasi	0,090	3,77	4
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,078	3,45	3
Real Estate	0,089	4,52	1
Jasa Perusahaan	0,089	0,02	4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,058	6,34	2
Jasa pendidikan	0,076	3,01	4
Jasa kesehatan	0,082	1,09	4
Jasa lainnya	0,109	0,77	3

Berdasarkan dari dua analisis yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa dari 17 sektor PDRB diketahui kontribusi dan daya saing terhadap perekonomian dan perkembangannya setiap tahun. Sebagian besar sektor PDRB belum memberikan pertumbuhan yang pesat terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Bulukumba, jika dilihat berdasarkan Tipologi Klassen pada kuadran IV terdapat delapan sektor yang relatif tertinggal dan sulit berkembang. Namun, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kabupaten bulukumba dalam periode penelitian ini berfluktuatif setiap tahunnya, ini disebabkan oleh kontribusi setiap sektor yang tidak konsisten dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tabel hasil analisis Tipologi Klassen pada Tabel 7 di bawah, studi ini mengindikasikan bahwa sektor yang termasuk dalam kuadran I yang maju dan bertumbuh pesat terdiri dari dua sektor yaitu sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor real estate. Artinya, bahwa selama periode penelitian ini kedua sektor tersebut yang secara konsisten sebagai sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten bulukumba. Kuadran II terdapat tiga sektor yang merupakan sektor unggulan yang menjadi penopang kebutuhan daerah tetapi belum konsisten dalam mendorong perekonomian daerah. Ini bisa dilihat dari nilai LQ sektor pertanian yang terus menurun dari tahun awal, sektor pertambangan yang nilai LQ nya fluktuatif serta sektor administrasi pemerintahan yang nilai LQ nya selama tiga tahun tidak mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada kuadran III terdapat empat sektor yang sangat potensial yang perlu mendapatkan dukungan dan pengelolaan yang lebih baik lagi dari pemerintah sehingga di masa mendatang bisa menjadi sektor basis baru bagi kabupaten bulukumba. Klasifikasi sektor terbanyak berada pada kuadran IV yaitu berjumlah delapan sektor

ekonomi yang artinya belum bisa berkontribusi tetapi menjadi sektor pembantu untuk sektor lainnya agar tetap konsisten dan bertumbuh pesat.

Tabel 7. Klasifikasi Sektoral Berdasarkan Tipologi Klassen Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

Rata-Rata Laju Pertumbuhan Sektoral (r)	Rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB (Y)	
	Y sektor \geq Y PDRB	Y sektor $<$ Y PDRB
r sektor \geq r PDRB	<p>Sektor Maju dan Tumbuh Pesat (Kuadran I) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Listrik dan Gas - Real Estate 	<p>Sektor Maju Tapi Tertekan (Kuadran II) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Perdagangan Besar dan eceran - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
r sektor $<$ r PDRB	<p>Sektor Potensial Atau Masih Dapat Berkembang Dengan Pesat (Kuadran III) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sektor Industri Pengolahan - Sektor Transportasi dan Pergudangan - Jasa Keuangan dan Asuransi - Jasa Lainnya 	<p>Sektor Relative Tertinggal (Kuadran IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan dan Penggalan - Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - Konstruksi - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - Informasi dan Komunikasi - Jasa Perusahaan - Jasa Pendidikan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber : Hasil Analisis Data PDRB Tahun 2015-2019

KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis location quotient sektor basis Kabupaten Bulukumba pada periode tahun 2015-2019 yaitu sektor pertanian, kehutan dan perikanan, sektor perdagangan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor real estate serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Hasil produksi dari kelima sektor basis ini dapat memenuhi

kebutuhan konsumsi daerah bersangkutan dan juga dapat melakukan ekspor ke luar daerah.

Hasil dari analisis Tipologi Klassen maka sektor basis yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba adalah sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor real estate. Dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Bulukumba terus memaksimalkan produksi pada sektor-sektor potensial.

Studi ini merekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk lebih mengutamakan pengembangan sektor unggulan dengan tidak mengabaikan sektor lainnya, sehingga dalam jangka pendek, menengah atau panjang dapat memberikan dampak yang tinggi pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Di sisi lain juga di harapkan mampu membuat arah kebijakan yang mendukung perkembangan sektor- sektor ekonomi yang menjadi sektor basis untuk mendorong atau merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang lainnya, sehingga kontribusi sektor tersebut semakin besar terhadap PDRB daerah dan mampu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bulukumba di masa mendatang.

Penelitian ini masih terbatas dalam tahapan menentukan sektor basis dan non basis untuk bisa dijadikan sebagai acuan. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terutama yang berkaitan dengan komoditas sektor dan sub-sektor agar didapatkan rekomendasi kebijakan yang lebih terfokus agar pemerintah lebih aplikatif pada penerapan kebijakan di masa mendatang.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin (2011) Pengantar Perencanaan dan pembangunan Ekonomi Daerah Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba (2020). Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2020, Bulukumba: BPS Bulukumba
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2020). Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2020, Makassar: BPS Provinsi Sul-Sel
- Glasson, John (1990) Pengenalan Perancangan Wilayah, Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malasya.
- Hasriadi. (2014) Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kolaka Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Jhingan, M. L. (2008) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lantemona, Arlen. (2014) *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota Manado*. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 14(3)
- Lestari, Andi Ayu Puji. (2017). *Peranan Sektor Basis Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun*. Pajak Kabupaten Sarolangun.
- Mahyudin, Ahmad. (2004) *Ekonomi Pembangunan Dan Analisis Data Empiris*. Bojongkerta: Ghalia Indonesia.
- Mangun, N. (2007) *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah*. Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Michael, P. Todaro (2011) *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin, (2004) *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, Adisasmita. (2005) *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, Adisasmita. (2008) *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardson, Harry W. (2001) *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sotihang, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sadono, Sukirno. (2006) *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Sirojuzilam. (2008) *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wliyah Timur Provinsi Sulawesi Utara*. Pustaka Bangsa Press.
- Sjafrizal. (2008) *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media'
- Subandi. (2014) *Ekonomi Pemabangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. (2001) *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus. 2008. *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Tambunan, Tulus T. H. (2001) *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori & Penemuan Empiris*. Jakarta: Salembang Empat.
- Tarigan, Robinson. (2005) *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Taringan, Robinson. (2007) *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Development Policy and Management Review (DPMR).
Syawal, T. et al. Analisis Sektor Basis Perekonomian Daerah.

Todaro, P Michael dan Smith, C Stephen, (2003) Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.
Jakarta : Erlangga.